

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) MELALUI PENINGKATAN KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DI SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA**

Adhitya Wardana Wamnebo

NPP. 30.0488

*Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: m.gilbertrivaldoelcowamnebo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Mustafik Amin, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the high number of people with social welfare problems in the East Jakarta Administrative City. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the effectiveness of empowering people with social welfare problems (PMKS) through improving the performance of state civil apparatus in the social service tribe of the East Jakarta administrative city of DKI Jakarta province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the State Civil Apparatus in the social service tribe of the East Jakarta administrative city of Jakarta province has made several efforts in empowering people with social welfare problems, such as providing training and guidance, as well as providing empowerment program programs for people with social welfare problems. However, there are still obstacles in the implementation of the empowerment program. The temporary impact has increased the empowerment of people with social welfare problems through the empowerment program by the social service department of the East Jakarta administrative city of Jakarta province in Jakarta. **Conclusion:** As an organization, the goal of the East Jakarta City Social Service in terms of empowering people with social welfare problems is to provide support to people who experience these problems so that they can be economically and socially independent. So far, the East Jakarta City Social Service has implemented various programs and activities to empower people with social welfare problems as mentioned earlier. However, to assess whether the social service ASN has successfully achieved organizational goals, a comprehensive and continuous evaluation is needed.

Keywords: Effectiveness, Empowerment (people with social welfare problems)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Administrasi Jakarta Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan kinerja aparatur sipil negara

di suku dinas sosial kota administrasi Jakarta Timur provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Aparatur Sipil Negara di suku dinas sosial Kota administrasi Jakarta Timur provinsi dki jakarta telah melakukan beberapa upaya dalam pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti memberikan pelatihan dan bimbingan, serta memberikan program pemberdayaan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Dampak sementara telah mengalami peningkatan terhadap pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan oleh suku dinas sosial kota administrasi Jakarta timur provinsi di jakarta. **Kesimpulan:** Sebagai sebuah organisasi, tujuan Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur dalam hal pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang mengalami masalah tersebut agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Se jauh ini, Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, untuk menilai apakah ASN dinas sosial telah berhasil mencapai tujuan organisasi, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan terus-menerus.

Kata kunci: Efektivitas, Pemberdayaan (penyandang masalah kesejahteraan sosial)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan masalah yang menghambat seseorang untuk melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Undang-Undang yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah kota, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Di dalam undang-undang tersebut pada bagian bab III mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepatnya pasal 5 yang bagian nomor 2 berisi mengenai “Kriteria masalah sosial yaitu meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi”. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan suatu kebutuhan bagi upaya penyelesaian masalah kehidupan masyarakat mulai dari masalah kemiskinan sampai masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal ini maka terbentuklah dua kelompok yang saling berkaitan yaitu pemerintah dan masyarakat. Keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat terbangun atas kontrak sosial. Implikasi dari kontrak sosial yakni pemerintah dijadikan personafikasi negara yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat dengan memobilisasi segenap sumber daya. Fungsi pemerintah berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana disebutkan di atas, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah daerah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang difokuskan menekan angka pengemis dan gelandangan. Hal ini untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang kompleks dimana untuk memenuhi harkatnya sebagai manusia mereka

harus hidup sejahtera, hal ini dilihat dari kelayakan hidupnya. Tetapi pada kenyataannya banyak daerah- daerah di Indonesia yang tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya sendiri dan disamping itu masih ada sebagian daerah yang tertinggal. Sebagian daerah tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan, pusat industri, perdagangan dan perekonomian. Kepadatan penduduk DKI Jakarta telah melampaui batas jenuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta wilayah yang luasnya hanya 662,33 km² dihuni oleh 9.607.787 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta adalah sebanyak 14.695 orang per km², yakni laki-laki sebanyak 4.870.938 orang dan perempuan sebanyak 4.736.849 orang. Bertambahnya penduduk disebabkan karena migrasi desa ke kota yang menimbulkan kepadatan penduduk dan kemiskinan. Dorongan utama bermigrasi ke kota adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Dengan adanya migrasi akan terlihat adanya perubahan yang ditandai dengan konsentrasi penduduk di kota. Laju pertumbuhan ekonomi di kota menjadi daya tarik luar biasa bagi penduduk untuk hijrah ke kota (urbanisasi). Akibatnya jumlah penduduk semakin membengkak, konsumsi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melonjak, yang pada akhirnya akan menimbulkan sektor informal di kota. Kondisi miskin di daerah asal dengan tingkat pendidikan rendah, *skill* atau kemampuan yang kurang dan minimnya pengalaman membuat mereka pada umumnya tidak memiliki akses yang cukup besar untuk melihat daya tarik di wilayah tujuan. Dengan besarnya dorongan bermigrasi yang membuat mereka pada sebuah resiko yang harus dihadapi, para pendatang adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di desanya. Mereka juga bukan orang yang memiliki pengetahuan ataupun keterampilan secara memadai yang dapat dipergunakan untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan dalam struktur formal di desa, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih baik untuk dapat hidup secara layak. Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi. Saat ini Kementerian Sosial menangani 22 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 609 orang penduduk DKI Jakarta yang dikategorikan memiliki masalah sosial (Dinas Sosial DKI Jakarta tahun 2019). Walaupun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya akan tetapi Hal ini menggambarkan bahwa kondisi masyarakat DKI Jakarta saat ini sangat perlu perhatian, terutama terhadap anak-anak dan wanita dengan keterbatasan diri yang dimilikinya, sehingga sering menjadi korban utama masalah sosial dalam lingkungan. Namun tidak merubah angka kemiskinan di wilayah ini. Termasuk dengan

semakin bertambahnya jumlah PMKS di Jakarta Timur. PMKS di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2020-2022 jumlah keseluruhan PMKS paling tinggi berada pada tahun 2022 dengan jumlah 482 orang. Peningkatan jumlah anak terlantar, wanita tua lansia, gelandangan dan pengemis disebabkan oleh perubahan dari tahun ke tahun yang menggambarkan bahwa kondisi masyarakat DKI Jakarta saat ini sangat perlu perhatian, terutama terhadap anak-anak dan wanita dengan keterbatasan diri yang dimilikinya, sehingga sering menjadi korban utama masalah sosial dalam lingkungan, kemudian pemberlakuan *new normal* pascapandemic covid-19. Sehingga aktivitas yang sempat dibatasi sudah kembali berjalan normal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Penelitian oleh Sugito (2014) yang berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bekasi, Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif deskriptif Survey terhadap responden. Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan pada metode penelitian dengan fokus penelitian yang sama. Penelitian oleh Cica Nopika Zari (2018) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu persamaan pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian oleh Sutarto (2021) yang berjudul Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu persamaan pada metode penelitian yang digunakan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada kebijakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Sugito (2014) tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas menurut Robbin (1995) dalam buku Steers. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan manajemen pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan kinerja aparatur sipil negara di suku dinas sosial kota administrasi Jakarta Timur provinsi DKI Jakarta, menganalisis faktor penghambat efektivitas pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan kinerja aparatur sipil negara di suku dinas sosial kota administrasi Jakarta Timur provinsi DKI Jakarta, mendiskripsikan upaya yang dapat dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengatasi hambatan efektivitas pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan kinerja aparatur sipil negara di suku dinas sosial kota administrasi Jakarta Timur provinsi DKI Jakarta

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pemberdayaan masyarakat penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 15 orang yang diambil dari Dinas Sosial, Masyarakat, dan Masyarakat Penyandang PMKS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Efektivitas menurut Robbin (1995) dalam buku Steers bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Pendekatan Pencapaian Tujuan, Pendekatan Sistem, Pendekatan Strategi Konstituen, dan Pendekatan Nilai Kompetitif. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Pendekatan Tujuan

Pendekatan tujuan (goal attainment approach). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) daripada caranya (means). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan Manajemen By Objectives (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori efektivitas Robbin, pendekatan tujuan adalah sebuah metode manajemen di mana organisasi memusatkan perhatiannya pada penentuan tujuan yang jelas dan spesifik, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik cenderung lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut.

Visi dan misi yang dimiliki oleh suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seharusnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Visi dan misi yang jelas dan fokus terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat memberikan arah yang jelas dan tujuan yang jelas bagi ASN dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya visi dan misi yang jelas, ASN dapat memahami dan menginternalisasi tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. ASN dapat bekerja secara fokus dan terarah dalam memenuhi tujuan dan visi tersebut. Selain itu, visi dan misi yang jelas juga dapat memotivasi ASN untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal pemberdayaan

masyarakat, ASN dapat melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menerapkan pendekatan yang partisipatif dan berkesinambungan. ASN juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya, untuk memperkuat sinergi dan memaksimalkan hasil pemberdayaan. Namun, untuk memastikan bahwa visi dan misi tersebut benar-benar memberikan pengaruh yang positif terhadap ASN dalam pemberdayaan masyarakat, perlu adanya komunikasi yang efektif dan transparan antara pimpinan dengan ASN. Pimpinan dapat menyampaikan visi dan misi dengan jelas, memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan, serta memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja ASN yang telah memenuhi tujuan dan visi tersebut.

3.2. Pendekatan Sistem

Menurut teori efektivitas Robbin, pendekatan sistem sangat penting dalam mencapai efektivitas organisasi. Pendekatan sistem menganggap organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam pendekatan sistem, organisasi harus memperhatikan seluruh elemen yang ada dan memastikan bahwa mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Pendekatan sistem juga menekankan pentingnya pengelolaan organisasi secara holistik, dimana setiap bagian dari organisasi harus diintegrasikan secara sinergis dan saling mendukung. Selain itu, pendekatan sistem juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap lingkungan eksternal organisasi dan bagaimana lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

3.3. Pendekatan Konsistensi Strategi

Pendekatan konsistensi strategi dalam teori efektivitas Robbin adalah sebuah pendekatan yang fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi melalui pengembangan dan penguatan unsur-unsur atau konsistensi yang membentuk organisasi tersebut. Dalam pendekatan kontituen strategi, organisasi harus memperhatikan dan mengembangkan semua kontituen tersebut secara seimbang agar dapat mencapai efektivitas yang optimal. Selain itu, organisasi juga harus mampu mempertimbangkan interaksi dan hubungan antara kontituen-kontituen tersebut, serta mengadaptasi strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kebutuhan bisnis yang berkembang. Suku dinas sosial kota administrasi Jakarta timur sudah cukup aktif dalam menjalin hubungan interaksi dengan masyarakat, namun perlu meningkatkan informasi tentang program-program mereka agar masyarakat bisa lebih terlibat dan memanfaatkan program-program yang diselenggarakan.

3.4. Pendekatan Nilai Kompetitif

Teori Efektivitas Robbin adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif. Pendekatan ini mengacu pada strategi organisasi untuk mencapai biaya produksi yang lebih rendah dari pesaingnya. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, organisasi dapat menawarkan harga jual yang lebih murah dan tetap mendapatkan keuntungan yang baik. Secara keseluruhan, teori ini menekankan pentingnya organisasi untuk memilih pendekatan nilai kompetitif yang sesuai dengan sumber daya dan keahlian yang dimilikinya serta kebutuhan pasar yang dihadapinya. Dengan memilih pendekatan nilai kompetitif yang tepat, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif dan dapat mempertahankan posisinya di pasar. Suku Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat PMKS (Orang yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial). Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, Suku Dinas Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat PMKS dan membantu mereka untuk mandiri dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu program

yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Sosial adalah program pelatihan keterampilan dan pendidikan. Dalam program ini, masyarakat PMKS diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti pelatihan menjahit, memasak, dan berkebun. Selain itu, Suku Dinas Sosial juga memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan lainnya, seperti pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran, sehingga masyarakat PMKS dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha kecil dan menambah penghasilan. Selain program pelatihan keterampilan dan pendidikan, Suku Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial berupa sembako, obat-obatan, dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak masyarakat PMKS. Bantuan sosial ini sangat membantu masyarakat PMKS untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, Suku Dinas Sosial juga melakukan pendampingan dan monitoring terhadap masyarakat PMKS yang telah mengikuti program pemberdayaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat PMKS benar-benar dapat mandiri dan menghasilkan pendapatan yang memadai. Dalam pendampingan ini, Suku Dinas Sosial memberikan bimbingan dan saran kepada masyarakat PMKS dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang mungkin dihadapi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kerja Suku Dinas Sosial sangat efektif dalam pemberdayaan masyarakat PMKS. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, Suku Dinas Sosial telah membantu masyarakat PMKS untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Target utama program pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Kelompok masyarakat ini meliputi orang miskin, tunawisma, korban kekerasan, pengemis, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan lain sebagainya. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mengalami masalah tersebut dengan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan sosial. Dengan fokus pada target utama ini, Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Sebagai aparatur pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi yang baik kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sejauh ini, suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pelatihan keterampilan yang didapatkan pada panti rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal kepada masyarakat UMKM, dan pendampingan sosial. ASN yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur yang ada, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, dan program pengembangan karir. Selain itu, suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur juga mengutamakan perekrutan pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik untuk memastikan bahwa aparatur yang ada dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat penyandang kesejahteraan sosial adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat dapat menghambat efektivitas program. ASN yang bertanggung jawab dalam

pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami kendala dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Jakarta Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas aparatur sipil negara sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Diperlukan kompetensi, pengetahuan, keterlibatan aktif masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang baik untuk mencapai tujuan program pemberdayaan tersebut. Pengukuran kinerja dan pencapaian program, pengukuran kepuasan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan, dan evaluasi atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh ASN dinas sosial. Hal ini akan membantu Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan memperbaiki program dan kegiatan yang sudah ada maupun membuat perubahan dan pengembangan program baru jika diperlukan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dan akses yang dimiliki oleh penulis. Keterbatasan ini mengakibatkan data serta informasi yang terkumpul belum maksimal dan belum mampu untuk menjawab keseluruhan dari aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Jakarta Timur, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cica Nopika Zari , Meyzi Heriyanto , Zaili Rusli. 2018. Efektivitas Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga
- Sugito M , Imam Muazansyah. 2014. Efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP)
- Sutarto 2018, Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan
- Steers, Richard M. (1985). *Managing Effective Organizations*. Kent Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.